



RENCANA KERJA

TAHUN 2026

**DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU**



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026.

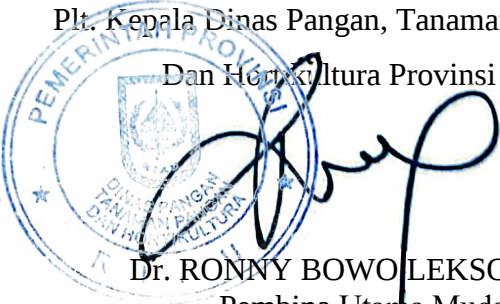
Renja 2026 ini akan menjadi pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang pangan, tanaman pangan, dan hortikultura pada Tahun 2026. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Riau dan kebijakan strategis nasional di sektor pertanian. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat menguraikan arah atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Dokumen ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa tantangan di sektor pertanian semakin kompleks dan dinamis, sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang inovatif untuk meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas, dan kesejahteraan petani di Provinsi Riau. Oleh karena itu, Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya bersama untuk memajukan ketahanan pangan di Provinsi Riau. Harapan kami, semoga Rencana Kerja ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Provinsi Riau.

Pekanbaru, November 2025

Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi Riau



Dr. RONNY BOWO LEKSONO, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760513 200501 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPTPH PROVINSI RIAU TAHUN 2024	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPTPH Provinsi Riau Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPTPH Provinsi Riau	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPTPH Provinsi Riau	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPTPH Provinsi Riau	42
2.4 Review Terhadap Penetapan RKPD	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	72
BAB III TUJUAN SASARAN DPTPH PROVINSI RIAU	77
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	77
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPTPH Provinsi Riau	77
3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	80
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPTPH PROVINSI RIAU	116
BAB V PENUTUP	141
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	(Tabel T-C.29. <i>Permendagri No. 86 Tahun 2017</i>) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2024 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	25
Tabel 2.2	(Tabel T-C.30. <i>Permendagri No. 86 Tahun 2017</i>) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	38
Tabel 2.3	(Tabel T-B.35. <i>Permendagri No. 86 Tahun 2017</i>) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	43
Tabel 2.4	(Tabel T-C.31. <i>Permendagri No. 86 Tahun 2017</i>) Review Terhadap Penetapan RKPD Tahun 2026 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	49
Tabel 2.5	(Tabel T-C.32. <i>Permendagri No. 86 Tahun 2017</i>) Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	73
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 (IKU Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau)	78
Tabel 3.2	(Tabel T-C.33. <i>Permendagri No. 86 Tahun 2017</i>) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	81
Tabel 4.1	Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi	3
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD (Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan meningkatkan ketahanan pangan dibutuhkan perencanaan yang lebih baik dalam pengelolaan sektor pangan dan pertanian. Renja Tahun 2026 ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pengelolaan sektor pangan, tanaman pangan, dan hortikultura. Fokus utama dari Renja ini adalah meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, memperkuat kelembagaan petani, serta mengembangkan infrastruktur pertanian yang mendukung keberlanjutan produksi pangan.

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Secara hirarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 dilandasi oleh berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ini. Aspek hukum ini memberikan legitimasi dan kerangka kerja yang jelas dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang akan dijalankan. Beberapa landasan hukum utama yang mendasari penyusunan Renja ini.

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau merupakan lembaga yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 11), yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pangan dan pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Selanjutnya tugas dan fungsi diatur didalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Riau No 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 43).

Implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub-sistem ketahanan pangan, yang mencakup: (1) Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan; (2) Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata Sistem distribusi bukan semata-mata, menyangkut aspek fisik dalam arti pangan tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga masyarakat mampu memperolehnya; serta (3) Subsistem konsumsi pangan mencakup upaya peningkatan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal.

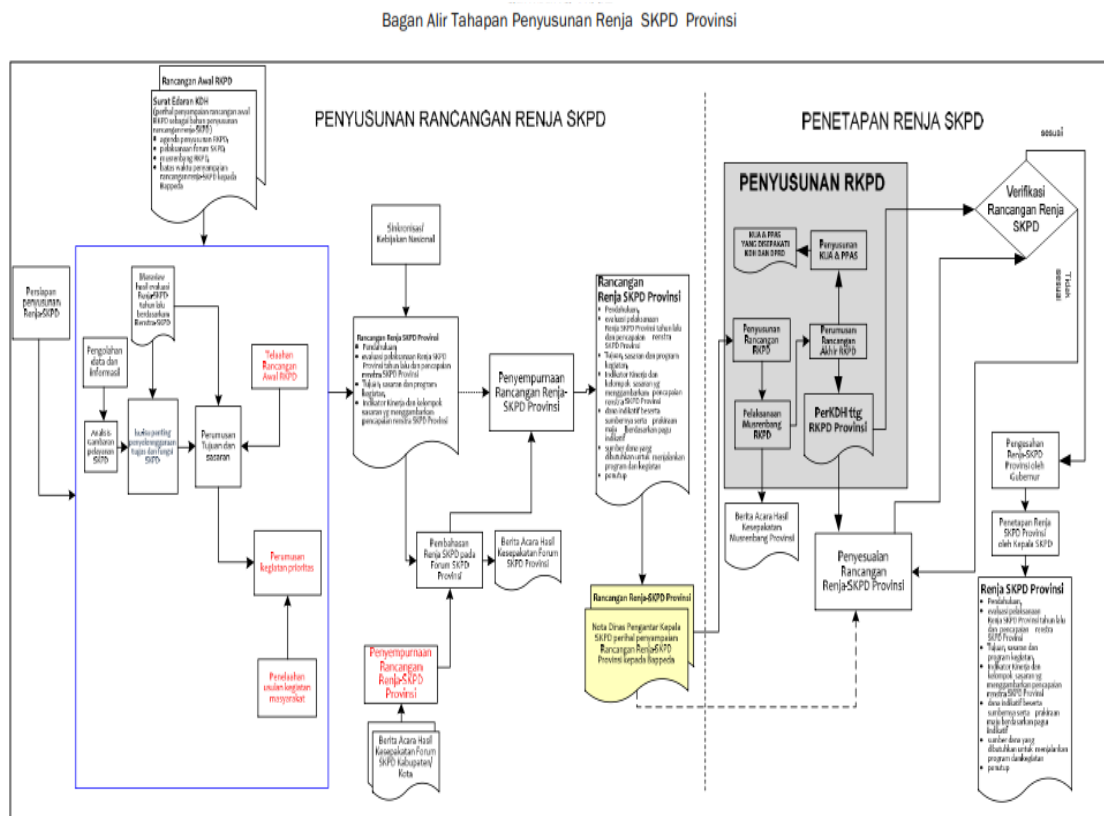
Berdasarkan kerangka pikir diatas, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2025 - 2029.

Penyusunan Rencana Kerja disusun dengan maksud untuk mengefektifkan dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2026 sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai yang dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Pertanian, Forum

Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah tahun 2026 guna merumuskan perencanaan Tahun 2026.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi



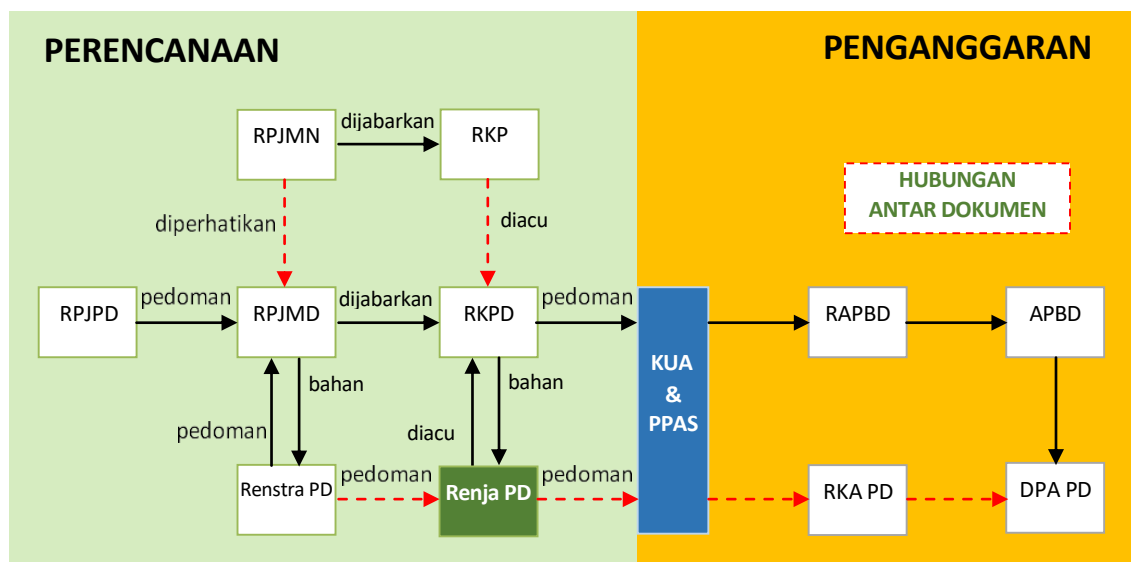
Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dengan memahami implikasi-implikasi tersebut, penyusunan Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Renja ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas dalam mencapai ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

Proses penyusunan Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi

Riau Tahun 2026 dan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas.

Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD (Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)



Sumber Data: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Dalam Gambar 1.2 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja mempedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 didasarkan pada berbagai landasan yang dijadikan acuan untuk memastikan bahwa rencana kerja tersebut sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180) (Khusus Perangkat Daerah terkait TPB);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Riau No 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 42);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 43);
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 36);
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 adalah untuk merumuskan rencana kerja dan operasional yang jelas dan terarah untuk satu tahun ke depan agar berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran serta menjadi instrumen penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sektor pangan, tanaman pangan, dan hortikultura yang berkelanjutan dan berdaya saing di Provinsi Riau yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Adapun tujuan

kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau adalah:

1. Menyusun daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, lengkap dengan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan anggaran yang dibutuhkan serta target dan output yang ingin dicapai dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Menyediakan alat ukur untuk menilai kinerja Perangkat Daerah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) sehingga memungkinkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, serta merencanakan tindakan mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut.
4. Mengarahkan kegiatan jangka pendek untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam rencana strategis atau rencana pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2026 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, dan
7. Lampirkan tabel berikut, **Tabel T-C.29**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.
2. Lampirkan tabel berikut, **Tabel T-C.30.**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDG's (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Penetapan RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, **Tabel T-C.31.**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/ sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan **Tabel T-C.32.**

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Lampirkan tabel berikut, **Tabel T-C.33**.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Diambil dari Sistem SIPD pada Tahapan Final RKPD

BAB V. Penutup

Berisi uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangkapelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.
4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan **tempat** dan **tanggal** dokumen, **nama Perangkat Daerah** dan **nama** dan **tanda tangan kepala Perangkat Daerah**, serta **cap** pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan pengelolaan yang bertujuan untuk mengukur pencapaian serta efektivitas dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada BAB ini, akan menguraikan hasil dari evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Evaluasi ini menjadi landasan penting dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tersebut dapat tercapai dengan baik. Pada BAB ini juga akan membahas pencapaian tujuan, efektivitas program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, akan dibahas pula faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan ke depan.

Dengan menyajikan analisis yang mendalam terhadap hasil evaluasi ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi semua pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah strategis yang lebih baik dalam perencanaan dan implementasi kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau merupakan langkah kritis dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan dalam mencapai tujuan strategis organisasi yang memberikan gambaran yang jelas tentang capaian serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun yang lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2025 serta realisasi capaian terhadap Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Perangkat Daerah (realisasi APBD Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau). Sedangkan untuk target dan capaian tahun 2025 (tahun berjalan) mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029. Terdapat perbedaan satuan indikator pada capaian 2023, 2024 dan 2025. Dikarenakan capaian Renstra yang diukur adalah Renstra 2025 – 2029 maka satuan indikator 2024 dikonversi (dengan catatan indikator masih relevan) agar capaian Renstra dapat dihitung.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 121.694.175.091,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.694.175.091 atau 85,90 %. Adapun capaian fisiknya sebesar 93,72 %. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Untuk mengukur kinerja pencapaian Renstra 2025 – 2029, dilakukan konversi indikator sebagai upaya kontinuitas data capaian. Berdasarkan tingkat realisasi tahun 2024 pada tabel TC – 29, program yang tidak memenuhi target adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan indikator Skor PPH (rata-rata skor PPH konsumsi dan ketersediaan). Tingkat capaian renja 92,78%. Dari target 95 poin terealisasi 88,14 poin. Angka ini adalah angka skor PPH Konsumsi karena angka skor PPH ketersediaan belum tersedia. Tingkat capaian cukup tinggi namun belum memenuhi target.
2. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator jumlah produksi tanaman pangan dan jumlah produksi hortikultura. Untuk produksi padi, tingkat capaian berada di angka 50,91 %. Dari target 436.203 Ton padi hanya tercapai 222.055 Ton. Sementara untuk jumlah produksi hortikultura tingkat capaian kinerja adalah 35,27%. Dari target 22.419 ton cabai hanya tercapai 7.907 Ton.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.

Pada tahun anggaran 2024, program yang memenuhi target adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura capaian 100%. Seluruh kegiatan pendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai kinerjanya.
2. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan indikator persentase penanganan bencana pertanian dan persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Kinerja penanganan bencana pertanian pada area terdampak terealisasi 100%. Dari target area penanganan 2.500 Ha terealisasi 2.500 Ha.
3. Program penyuluhan pertanian dengan indikator persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan capaian kinerja 100% dari target 10,38% realisasi 10,38% dimana dari 1.524 penyuluh sudah dilatih 165 penyuluh. Kinerja indikator kedua yaitu persentase kelompok yang membentuk korporasi capaian 100% dari target 68% realisasi 68% dimana dari 25 korporasi yang ditargetkan sudah terbentuk 17 korporasi petani.

i. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2024 program yang melebihi target yaitu program pengawasan keamanan pangan, program penanganan kerawanan pangan dan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Indikator program pengawasan pangan adalah Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar. Dari target 85% realisasi 93% (capaian 109,76%). Program penanganan kerawanan pangan dengan indikator persentase daerah rentan rawan pangan capaian 407,27%, target penurunan 36 Kecamatan realisasi 9 kecamatan atau

21,3 % menjadi 5,23%. Untuk program penyediaan pengembangan prasarana pertanian capaian 112, 32% dari target 9.170 Ha tercapai 10.300 Ha.

ii. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

A. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan, atau sub-kegiatan dalam Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut:

1. Anggaran mengalami rasionalisasi sehingga target pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai.
2. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan/kegiatan yang diselenggarakan untuk kabupaten/kota,
3. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik Kabupaten/kota,
4. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.
5. Kurangnya alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tertentu dapat menghambat pelaksanaan dan pencapaian target.
6. Kekurangan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, baik di tingkat petugas lapangan maupun penyuluh pertanian, dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program.
7. Kejadian seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama atau penyakit tanaman dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen.
8. Perubahan pola cuaca yang tidak terduga dapat mempengaruhi musim tanam dan produktivitas pertanian.
9. Keterbatasan dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan akses ke lahan pertanian, dan fasilitas penyimpanan dapat menghambat pencapaian target.

10. Keterbatasan akses petani terhadap teknologi modern dan praktik pertanian yang efisien dapat menurunkan produktivitas.
11. Perubahan harga pasar untuk komoditas pertanian dapat mempengaruhi pendapatan petani dan investasi mereka dalam praktik pertanian yang lebih baik.
12. Kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan atau kredit untuk usaha pertanian dapat menghambat pengembangan dan peningkatan produktivitas.
13. Perubahan kebijakan dan regulasi yang sering tanpa konsultasi yang memadai dengan para pemangku kepentingan dapat menciptakan ketidakpastian dan menghambat pelaksanaan program.
14. Prosedur administrasi yang kompleks dan lambat dapat menghambat penyaluran bantuan dan implementasi program.
15. Sikap dan perilaku petani yang resisten terhadap perubahan dan inovasi dapat menghambat adopsi praktik pertanian yang lebih baik.
16. Rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program pertanian dapat mengurangi efektivitas program.
17. Perencanaan yang tidak detail dan tidak memperhitungkan semua variabel yang relevan dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program.
18. Kurangnya pengelolaan yang efektif, termasuk monitoring dan evaluasi yang tidak memadai, dapat menghambat pencapaian target.
19. Keterbatasan koordinasi antara dinas-dinas terkait dan instansi lainnya dapat menyebabkan tumpang tindih program dan inefisiensi.
20. Rendahnya kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah dapat mengurangi sumber daya dan inovasi yang dapat mendukung program.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab ini melalui kebijakan yang tepat, perencanaan yang matang, dan pengelolaan yang efektif, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya target kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan.

B. Faktor-faktor Penyebab Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan

Untuk memahami mengapa target kinerja program atau kegiatan terpenuhi, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mendukung pencapaian target kinerja:

1. Menggunakan data dan analisis yang akurat untuk membuat perencanaan yang mencakup semua aspek program, termasuk risiko dan strategi mitigasi serta telah menetapkan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART) sehingga lebih mudah untuk dicapai dan dipantau.
2. Alokasi anggaran yang memadai dan tepat waktu untuk mendukung semua aspek program, termasuk operasional, pelatihan, dan infrastruktur serta adanya tim yang kompeten dan terlatih dengan baik untuk melaksanakan program dengan efisien.
3. Penggunaan teknologi pertanian yang maju seperti varietas unggul, sistem irigasi modern, dan alat pertanian yang efisien untuk meningkatkan produktivitas serta penerapan praktik-praktik inovatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil pertanian.
4. Adanya kebijakan yang mendukung dan stabil dari pemerintah pusat maupun daerah, yang memfasilitasi pelaksanaan program tanpa hambatan birokrasi serta regulasi yang memfasilitasi kemudahan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar bagi para petani.
5. Partisipasi aktif dari komunitas dan kelompok tani dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga memastikan relevansi dan dukungan lokal serta program pendidikan dan penyuluhan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.
6. Ketersediaan infrastruktur seperti irigasi, jalan akses, fasilitas penyimpanan, dan pasar yang baik untuk mendukung kegiatan

pertanian serta sistem distribusi dan logistik yang efisien untuk memastikan ketersediaan input pertanian dan penyaluran hasil panen yang tepat waktu.

7. Manajemen yang profesional dan berbasis data untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
8. Koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program secara sinergis serta kemitraan strategis dengan lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta untuk inovasi dan dukungan teknis.
9. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi, baik itu perubahan iklim, pasar, atau kebijakan, untuk memastikan keberlanjutan program serta pengelolaan risiko yang efektif dengan merencanakan skenario-skenario dan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

Dengan mengoptimalkan faktor-faktor tersebut, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau dapat memastikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan mereka, meningkatkan produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

C. Faktor-faktor Penyebab Melebihinya Target Kinerja Program/Kegiatan

Melebihi target kinerja program/kegiatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yang dapat bervariasi tergantung pada konteks dan jenis program/kegiatan tersebut. Beberapa faktor umum yang mungkin menyebabkan hal ini antara lain:

1. Tidak adanya perencanaan yang detail dan realistis dapat menyebabkan overachievement karena target yang ditetapkan terlalu rendah atau tidak sesuai dengan kapasitas sebenarnya.

2. Ketersediaan sumber daya (manusia, finansial, material) yang lebih banyak dari yang direncanakan dapat mempercepat pencapaian target.
3. Peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat mengakibatkan pencapaian target yang lebih cepat dari yang diharapkan.
4. Tim yang sangat termotivasi dan berkomitmen dapat bekerja lebih keras dan lebih cepat, sehingga target dapat tercapai atau terlampaui lebih awal.
5. Penggunaan teknologi atau metode baru yang lebih efisien dan efektif dapat meningkatkan produktivitas dan hasil.
6. Bantuan dari pihak eksternal, seperti mitra kerja, pemerintah, atau donor, dapat memberikan tambahan sumber daya atau dukungan yang mempercepat pencapaian target.
7. Perubahan dalam kondisi ekonomi, politik, atau sosial yang mendukung bisa mempercepat pencapaian target program/kegiatan.
8. Sistem monitoring dan evaluasi yang baik dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dengan cepat, sehingga program/kegiatan dapat berjalan lebih lancar.
9. Penyelarasan strategi dan tujuan program dengan kebijakan dan prioritas yang lebih tinggi, seperti pemerintah atau organisasi induk, bisa meningkatkan dukungan dan sumber daya yang tersedia.
10. Partisipasi aktif dari masyarakat atau penerima manfaat dalam program/kegiatan dapat meningkatkan keberhasilan dan mempercepat pencapaian target.

Faktor-faktor ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami mengapa suatu program/kegiatan bisa melampaui targetnya, dan untuk menerapkan strategi yang lebih baik di masa depan.

iii. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Rencana Strategis Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau bisa sangat beragam dan tergantung pada sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa implikasi spesifik yang sering timbul:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Riau.
6. Pengurangan alokasi anggaran dapat menghambat pelaksanaan program, mengurangi skala proyek, atau menunda kegiatan penting.
7. Fluktuasi harga komoditas pangan dapat mempengaruhi pendapatan petani dan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keberhasilan program-program peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
8. Keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi aktif dan penerimaan teknologi baru oleh petani. Kurangnya pengetahuan atau resistensi terhadap perubahan dapat menghambat pencapaian target.
9. Kekuatan dan solidaritas kelompok tani serta organisasi masyarakat juga mempengaruhi efektivitas implementasi program.

10. Kebijakan baru atau perubahan regulasi di tingkat nasional maupun provinsi dapat mempengaruhi prioritas dan alokasi sumber daya. Misalnya, perubahan dalam kebijakan impor pangan atau subsidi dapat mempengaruhi produksi lokal.
11. Regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan pestisida dan pengelolaan lahan dapat mempengaruhi praktik pertanian dan memerlukan penyesuaian dalam program.
12. Banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya dapat merusak infrastruktur pertanian, mengurangi produksi, dan mengalihkan sumber daya untuk penanganan bencana.
13. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tanam, ketersediaan air, dan kesehatan tanaman, sehingga memerlukan adaptasi dalam teknik pertanian dan pemilihan varietas tanaman.
14. Keberhasilan program peningkatan produktivitas sangat bergantung pada adopsi teknologi pertanian modern, seperti varietas unggul, teknik irigasi, dan manajemen hama terpadu.
15. Ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur teknologi, seperti sistem informasi pertanian dan fasilitas penyimpanan yang modern, juga berperan penting dalam mendukung program.
16. Kompetensi dan jumlah petugas penyuluh pertanian yang memadai sangat penting untuk mendukung transfer teknologi dan pengetahuan kepada petani.
17. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan petani serta petugas dinas akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
18. Akses terhadap benih berkualitas dan pupuk yang tepat waktu sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian.
19. Efisiensi sistem distribusi dan logistik yang baik diperlukan untuk memastikan input pertanian tersedia di seluruh wilayah provinsi.

Mengantisipasi dan mengelola implikasi-implikasi tersebut dengan perencanaan yang matang, monitoring yang efektif, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi akan membantu Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau dalam mencapai target capaian program Renstra dengan lebih baik.

iv. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang dapat mempengaruhi target capaian program Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, berikut adalah beberapa kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang perlu diambil:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Kasubbag Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengatur kembali teknis pencairan dana sesuai aliran kas yang tersedia;
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan,
4. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
5. Kerjasama dengan pihak *stakeholders* maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.
6. Mengidentifikasi dan mengejar berbagai sumber pendanaan tambahan seperti hibah, kerjasama dengan sektor swasta, dan pendanaan dari lembaga internasional.
7. Menyusun prioritas program berdasarkan urgensi dan dampak, sehingga anggaran yang terbatas dapat dialokasikan ke program-program yang paling kritis dan berpotensi memberikan dampak besar.
8. Mendorong penerapan skema asuransi pertanian untuk melindungi petani dari fluktuasi harga komoditas dan risiko gagal panen.

9. Mendorong diversifikasi produk pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan menstabilkan pendapatan petani.
10. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengadopsi teknologi baru.
11. Memperkuat sistem penyuluhan pertanian dengan menambah jumlah dan kualitas penyuluh pertanian yang dapat memberikan bimbingan teknis langsung kepada petani.
12. Mengembangkan kebijakan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan regulasi dan kondisi pasar.
13. Melakukan advokasi dan dialog dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan dan regulasi yang diterapkan mendukung kebutuhan dan kondisi lokal di Provinsi Riau.
14. Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan risiko bencana yang mencakup tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.
15. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan sistem irigasi efisien.
16. Investasi dalam infrastruktur teknologi pertanian seperti sistem irigasi modern, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, dan pusat informasi pertanian.
17. Mendorong penelitian dan inovasi dalam bidang pertanian untuk mengembangkan teknologi dan praktik baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian.
18. Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas dinas dan penyuluh pertanian secara berkala untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendukung petani.
19. Mendorong keterlibatan komunitas dan kelompok tani dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan relevansi dan keberhasilan program.

20. Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas input pertanian seperti benih berkualitas, pupuk, dan alat pertanian melalui penguatan rantai pasok dan distribusi.
21. Memberikan subsidi dan bantuan kepada petani yang membutuhkan untuk memastikan mereka memiliki akses ke input pertanian yang diperlukan.
22. Dengan menerapkan kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang tepat, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau dapat lebih efektif dalam mengatasi berbagai faktor penyebab yang dapat mempengaruhi target capaian program Renstra mereka.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek dari program dan kegiatan yang telah direncanakan serta dilaksanakan sepanjang tahun tersebut Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.29 (Permendagri No. 86 Tahun 2017) dibawah ini :

Tabel 2.1. (Table T-C.29. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2025 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN	
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)				TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6			7	8	9			10	11	12
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	100	Poin	88,9	Poin	95	Poin	95	88,14	92,78	90,29	Poin	91,1	91,1	91,1	Capaian 2024 masih menggunakan indikator 'Skor PPH Konsumsi '
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																
2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1	Dokumen		Dokumen						1	Dokumen	1	1	20	
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan		1	100	1	Laporan	1	1	20	
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1	Laporan		Laporan						1	Laporan	1	1	20	
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1	Laporan		Laporan						1	Laporan	1	1	20	

RENJA DPTPH Provinsi Riau Tahun 2026

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4		5		6		7	8	9			10	11	12
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	100	1	Laporan	1	1	20	
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen		Dokumen					1	Dokumen	1	1	20	
2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provins	1	Dokumen												
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi															
2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	50	Ton	32	Ton	44,5	Ton	62,21	Ton	75	Ton	75	62,21	20	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi															
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Dokumen	4	Dokumen	5	Dokumen	5	100	1	Dokumen	1	1	20	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1	Laporan		Laporan	1	Laporan			1	Laporan	1	1	20	
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	Laporan	1	Laporan			1		1	Laporan	1	1	20	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN		
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)				TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4		5		6		7	8	9			10	11	12	
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1	Laporan		Laporan						1	Laporan	1	1	20	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	1,74	Persen	9	Kecamatan	36	Kec	21,3 Persen	5,23 Persen	407,27	11	Kecamatan	4,65	4,65	4,65	Realisasi 2024 dan 2025 dikonversi untuk kontinuitas data
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi																
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen		1		1	Dokumen	1	1	20	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi																
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen		-	-	1	Dokumen	1	1	20	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar	96	Persen	100	Persen	85	Persen	85	93,3	109,76	80	Persen	80	93,7	97,6	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	95	Sertifikat	45	Sertifikat	50	Sertifikat		93	100	80	Sertifikat	80	60	63,2	
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5	Dokumen	0	Dokumen	5	Dokumen		6	100	1	Dokumen	1	1	20	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)				TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4		5		6				7	8	9			10	11	12
Urusan Pertanian																		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	100	Persen	100	100	20			
3.27.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	0	Dokumen	5	Dokumen	5	100	1	Dokumen	1	1	20			
3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	Dokumen														
3.27.01.1.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	Orang/Bu lan	330	Orang/Bul an	330	Orang/Bulan	300	100	330	Orang/Bu lan	300	300	20			
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		Laporan					1	Laporan	1	1	20			
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	100	1	Laporan	1	1	20			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN	
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)	TINGKAT REALISASI (%)					REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1	2	3	4		5		6			7	8	9				10	11	12
		SKPD																
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	2	Paket												
3.27.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	2	Dokumen						1	Dokumen	1		1	20	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	6	6	100	1	Paket	5		5	20	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	6	6	100	1	Paket	5		5	20	
3.27.01.1.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	4	Paket	6	6	100	1	Paket	5		5	20	
3.27.01.1.0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	6	6	100	1	Paket	5		5	20	
3.27.01.1.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	1	100	1	Laporan	1		1	20	
3.27.01.1.0610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen						1	Dokumen	2		2	20	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4		5		6		7	8	9			10	11	12
3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket		Paket					1	Paket	1	1	20	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18	Unit		Unit					10	Unit	24	24	20	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit			1	Unit	1	1	20	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	-		1	Laporan	1	1	20	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	100	1	Laporan	1	1	20	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	10	100	1	Laporan	5	5	20	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	Unit	8	Unit	8	Unit	8	100	6	Unit	6	6	20	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	75	Unit	90	Unit	90	Unit	95	100	67	Unit	75	75	20	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN	
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)				TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6			7	8	9			10	11	12
	Lapangan	Perizinannya															
3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	0	Unit						20	Unit	20	20	20	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	241	Unit	125	Unit	303	Unit		303	100	105	Unit	187	187	20	
3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	6	Unit	6	Unit	62	62	100	1	Unit	32	32	20	
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	Unit								0	Unit	1	1	20	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	#####	Ton	4,3	Ton/Ha	2,64	Persen	436.203 Ton	222.055 Ton	50,91	4,20	Ton/Ha	236.919	236.919	72,73	Indikator 2024 adalah persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, hasil konversi berdasarkan target pada tabel 7.1 dokumen Perubahan Renstra 2019 - 2024
		Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	8910	Ton			8		22.419 Ton	7.907 Ton	35,27			8066	8066	90,53	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan		1	100	1	Laporan	1	1	20	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)					TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	
1	2	3	4		5		6			7	8	9			10	11	12
		dan Sarana Pendukung Pertanian															
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1	Laporan													
3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	1	Laporan													
3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	0	Laporan													
3.27.02.1.01.0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0	Laporan													
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman																
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT PSBTPH)	Jumlah Sertifikat Benih	100	Sertifikat	500	Sertifikat	460	Sertifikat		308	66,96	500	Sertifikat	500	100	20	
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas,	2	Laporan	5	Laporan	1	Laporan		1	100	1	Laporan	2	2	20	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN	
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)				TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6			7	8	9			10	11	12
		mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga															
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2	Laporan	4	Laporan	1	Laporan		1	100	1	Laporan	2	2	20	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi													2		20	
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1	Laporan	5	Laporan				5	100	1	Laporan	1		20	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola	11.000	Ha	56.963	Ha	6,81	Persen	9170 Ha	10.300 Ha	112,32	55.846	Ha	10.350	1	94,09	Indikator baru, sebelumnya menggunakan indikator 'Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura '
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian																

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN	
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)				TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6			7	8	9		10	11	12	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3	Unit	0	Unit	1	Unit		1	100	1	Unit	1	20		
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	Dokumen	1	Dokumen											
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		1	100	1	Dokumen	1	20		
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		1	100	1	Dokumen	1	20		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100	Persen	77	Persen	6,81	Persen	100	100	100	76	Persen	100	100	20	Satuan indikator baru, sebelumnya diukur dalam luasan (Ha). Hasil konversi merupakan persentase penanganan
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100	Persen					100	100	100						
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi																
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	10.200	Ha	2.500	Ha	2500	Ha		2.500,00	100	2.500	Ha	2.500	1.800	17,65	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)					TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	
1	2	3	4		5		6			7	8	9			10	11	12
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	200	Ha	-	Ha						100	Ha	100	0		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	42,32	Persen	3	Persen	3	Persen	10,83	10,83 Persen	100	3	Persen	10,83	10,83	25,59	Indikator target 2024 hasil konversi target 165 orang penyuluh yang dilatih dari total 1.524 penyuluh.
		Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	100	Persen					68	68 Persen	100			68	68	68	Indikator target 2024 hasil konversi target 17 unit korporasi yang dibentuk dari total 25 unit korporasi kelompok tani.
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian																
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	24	Unit	0	Unit						24	Unit	24	24	20	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	90	Orang	97	Orang	120	Orang		165	137,5	225	Orang	225	165	20,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian																
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	36	Kelompok	48	Kelompok	24	Kelompok		24	100	379	Kelompok	379	24	66,67	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025- 2029		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TARGET KONVERSI PENYESUAIAN RENSTRA 2025 - 2029	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET RENJA 2024 (KONVERSI)	REALISASI RENJA 2024 (KONVERSI)				TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4		5		6				7	8	9			10	11	12
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berkbasis Kawasan																	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	3	Unit	0	Unit							2	Unit		2	1	33,3
3.27.07.1.0306	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2	Unit	0	Unit	2	Unit			2	100	2	Unit		2	0	0

Untuk capaian Renstra 2025 -2029 tahun 2025 merupakan tahun awal. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 masih mengacu dokumen Renstra 2025 – 2026. Beberapa target program pada Renstra 2025 – 2029 mengalami perubahan sesuai misi Kepala Daerah baru dan pemenuhan kriteria indikator yang akuntabel. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi capaian Renstra 2025 -2029 maka target dan realisasi tahun 2024 dan 2025 yang tidak sesuai dikonversi menjadi satuan yang sama agar capaiannya dapat diukur. Untuk Program dan kegiatan penunjang (rutin) rata-rata capaian Renstra adalah 20%. Untuk Program kegiatan dan sub kegiatan utama dan kunci ada yang sudah melebihi 90% seperti Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Kinerja ketiga program ini cukup tinggi pada tahun pertama karena target Renstra yang ditetapkan tidak terlalu tinggi mengingat anggaran Provinsi Riau sedang mengalami defisit. Untuk program lainnya memiliki capaian kinerja Renstra dikisaran 20 – 70 Persen. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan akibat efisiensi anggaran sehingga capaian Renstra masih tergolong rendah. Namu hal ini dapat dimaklumi karena masih tahun awal pencapaian Renstra. Akan dilakukan upaya yang lebih efektif untuk mencapai target akhir Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPTPH Provinsi Riau

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 42) dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 43).

Dalam Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan sesuai dengan Renstra 2025 – 2029. Indikator kinerja utama ditetapkan berdasarkan indikator sasaran yang ditetapkan melalui turunan visi misi Kepala Daerah terpilih tahun 2025 – 2029 yang disusun menggunakan analisa *cascading* (pohon kinerja). Indikator *kinerja kunci merupakan indikator outcome yang juga ditetapkan dari cascading*.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.2 (T-C.30. *Permendagri No. 86 Tahun 2017*) di bawah ini.

Tabel 2.2. (Tabel T-C.30. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

No	Indikator	SPM/Standar Nasional		Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			IKK	2024		2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				Renstra 2019 - 2024		Renstra 2025 - 2029							
	Indikator Kinerja Utama												
1	Indeks ketahanan pangan	√		71,12	Indeks	71,93	73,46	75,04	70,42		73,46	75,04	
2	NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	√		(*)	Desimal/persen	96,05	96,32	97,12	95,84		96,32	97,12	
3	NTP Sub Sektor Hortikultura	√		(*)	Desimal/persen	105,78	107,24	109,15	103,83		107,24	109,15	
4	Indeks ketersediaan pangan	√		(*)	Indeks	39,24	40,77	42,35	70,42		40,77	42,35	
5	NTUP Tanaman Pangan	√		101,8	Desimal/persen	97,07	97,56	98,01	94,86		97,56	98,01	
6	NTUP Hortikultura	√		103,8	Desimal/persen	104,86	105,33	106,23	104,26		105,33	106,23	
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	√		(*)	Poin	72,85	73,42	74,02	72,15		73,42	74,02	
	Indikator Kinerja Kunci												
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian		√	(*)	Persen	100	100	100	100		100	100	Indikator baru, angka realisasi merupakan hasil konversi
9	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan		√	(*)	Persen	93,3	93,7	94	93		93,7	94	Indikator baru, angka realisasi merupakan hasil konversi
10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan		√	(*)	Persen	12,8	19	24,61	11		19	24,61	Indikator baru, angka realisasi merupakan hasil konversi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional		Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			IKK	2024		2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
11	Jumlah produksi tanaman pangan		√	436.203	Ton	236.919	252.497	269.098	222.055		252.497	269.098	
12	persentase daerah rentan rawan pangan		√	21,3(*)	Persen	4,65	4,07	3,49	5,23		4,07	3,49	Indikator baru, angka realisasi merupakan hasil konversi
13	Cakupan luas lahan pertanian LP2B yang dikelola		√	(*)	Ha	10.350	10.400	10.500	10.300		10.400	10.500	Indikator baru, angka realisasi merupakan hasil konversi
14	Persentase kelompok yang membentuk korporasi		√	(*)	Persen	68	72	76	68		72	76	Indikator baru, angka realisasi merupakan hasil konversi
15	Jumlah Produksi Hortikultura		√	22.419	Ton	8.066	8.228	8.394	7.907		8.228	8.394	
16	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		√	(*)	Persen	100	100	100	100		100	100	Indikator baru, angka realisasi merupakan hasil konversi
17	Skor PPH		√	96(*)	Skor	91,1	93,15	94,8	88,14		93,15	94,8	Indikator tahun 2024 adalah Skor PPH Ketersediaan

Catatan = 1. (*) Pada Renstra 2019 – 2024 bukan merupakan indikator

2.Data Realisasi Tahun 2025 belum ada

Dari tabel T-C.30 tersebut dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sesuai Renstra 2025 – 2029 diukur melalui 17 (tujuh belas) indikator, 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama dan 10 (Sepuluh) indikator kinerja kunci yang ditetapkan melalui *cascading* kinerja hasil penyesuaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih 2025 – 2029. Indikator yang ditetapkan memiliki kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART), sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan pencapaian tujuan strategis dalam bidang penyelenggaraan urusan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Perubahan beberapa indikator kinerja berdampak pada data historis capaian kinerja oleh karena itu pada capaian kinerja tahun 2024 dikonversi sesuai indikator baru untuk menjaga kontinuitas data. Kontinuitas ini untuk membantu monitoring dan evaluasi dalam mengukur kemajuan dan mengidentifikasi kinerja yang memerlukan perbaikan.

Dari seluruh Indikator pelayanan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Tahun 2024 hanya 1(satu) indikator yang mencapai target yaitu NTUP Hortikultura. Indikator yang tidak mencapai target yaitu indeks ketahanan pangan, NTUP Tanaman pangan, persentase daerah rentan rawan pangan, jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura dan Skor PPH.

Untuk kinerja NTUP Tanaman Pangan dan produksi tanaman pangan (padi) kendala pencapaiannya adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya infrastruktur dalam mendukung peningkatan intensitas pemanfaatan lahan seperti jaringan irigasi yang tidak fungsional dan tanggul yang tidak berfungsi.
2. Alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra tanam dan pasca panen yang belum memadai untuk melakukan percepatan tanam serta untuk meminimalisir kehilangan hasil.
3. Rendahnya capaian produksi juga disebabkan pada tahun 2024 terjadi puso akibat anomali iklim,
4. Selain dari pada itu, rendahnya produksi juga disebabkan karena ada 4.066,8 Ha padi ladang yang tidak terakomodir dalam perhitungan luas panen dengan metode KSA.

5. Pola pertanian yang subsisten yang orientasinya masih untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Untuk kinerja produksi cabai kendalanya yaitu capaian produksi yang cukup tinggi ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produktivitas tanaman cabe. Dengan penerapan teknologi budidaya tanaman cabe serta penggunaan sarana produksi (bibit/benih bermutu, pupuk yang sesuai kebutuhan dan lain lainnya) dapat memicu peningkatan produktivitas. Komoditi tanaman cabe juga termasuk tanaman yg cukup diminati oleh petani, karena harga yang cukup bersaing di pasaran.

Untuk kinerja Indeks Ketahanan Pangan kendala pencapaiannya sama dengan kendala pencapaian penanganan keawanan pangan dan Skor PPH yaitu sebagai berikut :

1. Tingginya biaya distribusi pangan ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) akibat infrastruktur jalan/logistik yang belum optimal.
2. Fluktuasi harga pangan strategis yang tinggi, dipengaruhi oleh cuaca ekstrem dan keterbatasan pasokan.
3. Lemahnya integrasi pasar lokal, yang membuat harga di tingkat petani dan konsumen tidak terkoneksi dengan baik.
4. Keterbatasan intervensi anggaran untuk operasi pasar murah dan distribusi pangan bersubsidi
5. Rendahnya literasi gizi masyarakat, terutama dalam pemilihan dan pengolahan pangan yang aman dan bergizi
6. Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih dan sanitasi layak, berdampak pada keamanan pangan.
7. Kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan pangan rumah tangga yang higienis, menyebabkan pemborosan pangan dan keracunan makanan.
8. Belum optimalnya program edukasi B2SA di sekolah, posyandu, dan komunitas ibu rumah tangga.

Dengan analisis yang komprehensif, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau juga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta merumuskan strategi peningkatan kinerja yang efektif. Untuk melakukan analisis kinerja pelayanan DPTPH Provinsi Riau, kita dapat menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang relevan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, dan telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Adapun permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Provinsi Riau berdasarkan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah Provinsi Riau belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah yakni :

- 1) Rendahnya produksi beras pada tahun 2024 yaitu 127.439 Ton, hanya memenuhi 22,08 % dari konsumsi 577.267 Ton
- 2) Masih rendahnya produktivitas komoditas pangan, dimana untuk produktivitas padi sawah Provinsi Riau masih dibawah produktivitas nasional (51,28 Ku GKG per hektar). Pada tahun 2024 produktivitas hanya sebesar 39,4 Ku GKG per hektar. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas adalah terbatasnya ketersediaan benih unggul secara berkelanjutan.
- 3) Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan, sementara kebutuhan konsumsi beras penduduk Riau semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan rasio produksi dan konsumsi yang cukup besar, sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan Provinsi Riau terhadap pasokan beras dari luar masih tinggi dan semakin meningkat.
- 4) Dari 12 kab/kota hanya 8 kab/kota yang memiliki cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), yaitu Pekanbaru, Dumai, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Bengkalis dan Kampar. Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah pada tahun 2025 sebesar 99,46 ton dari jumlah kebutuhan sebesar 210,67 ton atau hanya mencapai 47,21 %.
- 5) Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Untuk pengawasan terhadap mutu produk relatif masih jauh lebih rendah, sedangkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar sudah dilakukan untuk kelompok buah dan sayur

- 6) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan cadangan pangan beras sebanyak 200 ton dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 100 ton. Sementara cadangan pangan yang tersedia sampai saat ini adalah 99,46 ton. Keterbatasan dalam pengelolaan cadangan pangan daerah ini akan berdampak pada :
- Instabilitas pasokan pangan antar waktu dan antar daerah;
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta kerawanan pangan pasca bencana dan kerawanan pangan spesifik lokasi;
 - Instabilitas harga ketika mengalami goncangan dari pasar domestik maupun internasional;
 - Rendahnya akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Berikut disajikan tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel 2.3. (Tabel T-B.35. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Provinsi Riau belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan	1. Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan.	1. Produksi Padi Provinsi Riau dari tahun 2021-2023 cenderung menurun, pada tahun 2021 produksi padi 217.459 ton sedangkan pada 2022 produksi padi terjadi penurunan menjadi sebesar 213.557 ton dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi sebesar 210.374 ton. Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,51 % namun tidak signifikan, sementara kebutuhan konsumsi beras penduduk Riau dari tahun 2021-2024 cenderung meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. 2. Belum meratanya pemahaman masyarakat akan diverifikasi pangan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Belum termanfaatkan secara maksimal potensi pangan lokal sebagai pengganti beras, beberapa komoditi yang memiliki potensi untuk tanaman pangan antara lain seperti sagu, kedelai, jagung, porang, sorgum, umbi-umbian.
		2. Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar	1. Kurangnya sarana, prasarana dan petugas untuk melakukan pengawasan serta pengujian mutu produk pertanian. 2. Rendahnya tingkat kesadaran petani untuk melakukan pengujian mutu produk, sehingga produk yang masuk dipasar sebagian besar belum diketahui tingkat keamanan pangan segarnya.
		3. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah	1. Dari 12 kab/kota hanya 8 kab/kota yang memiliki cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), yaitu Pekanbaru, Dumai, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan dan Bengkalis dan Kampar. 2. Instabilitas harga ketika mengalami goncangan dari pasar domestik maupun internasional. 3. Rendahnya akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien pada daerah perbatasan, terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah pada tahun 2025 sebesar 99,46 ton dari jumlah kebutuhan sebesar 21,67 ton atau hanya mencapai 47,21 %.
		4. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	1. Terjadi penurunan produksi beberapa komoditas utama yang berpengaruh terhadap inflasi (cabe, bawang merah), sementara kebutuhan dan permintaan terhadap komoditas tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. 2. Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. (Untuk produktivitas padi berkisar 4,04 ton per hektar dibawah rata-rata produktivitas nasional 5,2 ton per hektar). 3. Masih belum optimal tergali potensi buah-buahan yang menjadi komoditas unggulan daerah, seperti durian, manggis, jeruk, kelengkeng dan nenas yang mendukung

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			pengembangan agrowisata di provinsi Riau. 4. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan perkarangan maupun lahan tidur lainnya untuk ditanami sayur-sayuran untuk peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan keluarga. 5. Harga pupuk yang berfluktuasi sehingga perlu dibentuknya Unit Pengolahan Pupuk Mandiri untuk menghasilkan pupuk organik dan lainnya sehingga tetap dapat meningkatkan produktifitas tanaman sebagai substitusi pupuk kimia.
		5. Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan dan terjadinya penurunan luas lahan	1. Terjadi alih fungsi lahan sawah kepada fungsi lainnya seperti perkebunan, perumahan, infrastruktur dan lainnya. 2. Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan, pada tahun 2024 IP 100 sebanyak 28.931,40 Ha sedangkan IP 200 sebesar 18.313,46 Ha dan IP 300 sebanyak 3.442,12 Ha)
		6. Kondisi dukungan infrastruktur lahan pertanian belum memadai	1. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai/ dalam kondisi baik (jaringan irigasi, JUT, alsintan, pupuk, pestisida, benih dll). 2. Berdasarkan evaluasi terhadap kondisi jaringan irigasi, tidak ada penambahan/ bangunan baru bendungan dan irigasi yang ada hanyalah perawatan yang telah dibangun pasca kemerdekaan RI. 3. Perlu dipertimbangkan alternatif sumber air untuk irigasi baik sumber air permukaan maupun sumber air dalam. 4. Belum tersedianya Brigade Alsintan (Alat Mesin Pertanian) yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur pertanian secara cepat dan berpindah-pindah.
		7. Semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja dan kurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian	1. Rendahnya kompetensi SDM pertanian baik aparatur maupun petani 2. Sektor pertanian dianggap tidak menarik. 3. Nilai tukar petani (NTP) pertanian subsektor tanaman pangan dan hortikultura masih dibawah 100.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi dan sumber daya desa untuk sektor pertanian	1. Banyak dana desa yang belum termanfaatkan dengan baik. 2. Aparatur desa belum memanfaatkan dana desa secara produktif.
		9. Masih belum berkembangnya unit layanan pada perangkat daerah sebagai Badan Layanan Usaha yang profesional.	1. Pelayanan UPT masih bersifat tradisional, belum berorientasi bisnis. 2. Adanya potensi pendapatan daerah dari layanan UPT. 3. Perlu dipertimbangkan sebuah inisiatif atau fasilitas Klinik Tanaman untuk memberikan layanan konsultasi, diagnosa, dan perawatan bagi tanaman dalam mengatasi masalah yang terkait dengan pertumbuhan dan kesehatan tanaman.

Dalam menentukan isu isu strategis, ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau terhadap capaian program.

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan, Dengan mencermati gambaran pelayanan pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, maka faktor internal dapat ditentukan sebagai berikut:

- **Kekuatan (*strenghts*):**

1. Tersedianya sumberdaya manusia
2. Tersedianya sumberdaya lahan
3. Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi)
4. Tersedianya komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemenuhan pangan
5. Tersedianya peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden

6. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, kebijakan.

- **Kelemahan (*weakness*):**

1. Penerapan teknologi budidaya tanaman yang belum optimal
2. Infrastruktur, prasarana & sarana tanaman pangan dan hortikultura yang belum memadai
3. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura yang belum optimal
4. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah
5. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih
6. Belum stabilnya harga komoditi pangan dilihat dari koefisien harga pangan
7. Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan
8. Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan
9. Masih banyaknya daerah rentan pangan
10. Masih kurangnya cadangan pangan pemerintah daerah

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan, Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka faktor eksternal dapat ditentukan sebagai berikut

- **Peluang (*opportunities*):**

1. Potensi sumberdaya tanaman pangan dan hortikultura masih dapat ditingkatkan
2. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri
3. Iklim investasi terhadap produk hortikultura yang kondusif
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan
5. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah

6. Adanya program prioritas pengentasan kemiskinan, pengarusutamaan gender, pembangunan Infrastruktur, peningkatan pendidikan, peningkatan penataan lingkungan, kebersihan, penguatan pembangunan ketahanan pangan, peran swasta dalam pembangunan dan program pusat
7. Adanya kerja sama regional dan daerah
8. Adanya permintaan pasar terhadap produk pangan lokal dan olahannya,
9. Adanya 9 pembagian Urusan pemerintahan Konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Kab/Kota di Bidang Pangan sesuai lampiran UU 23 Tahun 2014
10. Adanya 10 pembagian Urusan pemerintahan Konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Kab/Kota di Bidang Pertanian sesuai lampiran UU 23 Tahun 2014
11. Adanya Master Plan Program Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
12. Adanya Millenium Development Goals (MDGs)

• **Tantangan (*threats*):**

1. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih rendah
2. Alih fungsi lahan setiap tahun terus meningkat
3. Penguasaan teknologi pertanian masih rendah
4. Isu Lingkungan hidup dan globalisasi
5. Daya saing produk olahan pertanian serta pemasaran masih terbatas
6. Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan petani belum maksimal
7. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas
8. Kepastian status Kelompok Tani/Gapoktan
9. Skala usaha tani (*farm size*) yang semakin sempit

2.4. Review Terhadap Penetapan RKPD

Review terhadap Penetapan RKPD merupakan proses membandingkan antara Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan analisis kebutuhan perencanaan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026

Tabel 2.4. (Tabel T-C.31. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Penetapan RKPD Tahun 2026 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					76.649.266.887	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2.449.755.000	
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Skor Pola Pangan Harapan	93,15	Poin	1.948.308.496	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	93,15	Poin	1.704.600.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	7	Dokumen	665.058.960	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				932.850.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1	Dokumen	366.600.200	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1	Dokumen	505.000.000
	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	Laporan	111.590.000	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	Laporan	166.800.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1	Laporan	23.230.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1	Laporan	28.850.000
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1	Laporan	106.830.000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1	Laporan	110.250.000
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1	Laporan	26.560.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1	Laporan	55.125.000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen	5.565.104	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen	11.700.000
	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi		Data proyeksi neraca pangan wilayah Provinsi	1	Dokumen	24.683.656	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Data proyeksi neraca pangan wilayah Provinsi	1	Dokumen	55.125.000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1	Laporan	1.105.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1	Laporan	330.750.000
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	85	Ton	1.105.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	25	Ton	330.750.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	4	Dokumen	178.249.536	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	4	Dokumen	441.000.000
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Dokumen	133.842.672	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Promosi Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Dokumen	220.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1	Laporan	32.494.104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1	Laporan	110.250.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	Laporan	6.123.656	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	Laporan	55.125.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1	Laporan	5.789.104	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1	Laporan	55.125.000
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					38.177.380						

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	4,07	Persen	38.177.380	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Penurunan Wilayah Rawan Pangan	9	Kecamatan	595.350.000
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	1	Laporan	17.932.380	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)			45.000.000
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	17.932.380	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	45.000.000
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	1	Laporan	20.245.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)			36.585.000
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1	Dokumen	20.245.000	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1	Dokumen	36.585.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					214.462.300.665	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					214.462.300.665
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					74.662.781.011						

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
1	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	55.308.244.601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	56.483.113.682
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.240.500						161.182.850
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	27.240.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	161.182.850
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	1	Laporan	47.364.285.488	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.467.195.377
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	Orang/Bulan	47.364.285.488	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	Orang/Bulan	49.467.195.377
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100	Persen	29.073.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	Persen	102.500.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	20.823.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	8.250.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1	Laporan	52.500.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
			pada SKPD						Daerah pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat Daerah	100	Persen	25.550.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	52.500.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	25.550.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	52.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	1.453.375.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1.436.623.295
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	36.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	34.997.084
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	183.750.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	174.993.225
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	236.250.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	199.200.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	89.250.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	59.315.986

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	896.875.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	957.617.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	10.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	10.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	315.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	304.892.160
	Pengadaan Mebel	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	105.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	99.917.160
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	105.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	99.950.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	105.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	105.025.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	4.600.334.096	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	3.850.350.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	15.270.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	20.000.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1.364.999.296	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1.365.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	3.220.064.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	2.465.350.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.156.619.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		1.107.870.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	Unit	244.530.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit		244.530.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67	Unit	274.592.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67 Unit		274.790.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20	Unit	95.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit		9.800.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105	Unit	223.997.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,	105 Unit		78.750.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
									Semua Kel/Desa			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Unit	318.499.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Unit	500.000.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					14.744.595.000						
2	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Jumlah produksi hortikultura	252.497	Ton	14.744.595.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah produksi hortikultura	252.497	Ton	28.184.850.000
			Jumlah produksi tanaman pangan	8.228	Ton			Jumlah produksi tanaman pangan	8.228	Ton		
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Luas Lahan yang Difasilitasi Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.650	Ha	10.893.470.000	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Luas Lahan yang Difasilitasi Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			21.247.350.000
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	7.683.250.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	19.644.000.000
	Pengawasan sebaran saran pacapanen tanaman pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan ketersediaan dan Sebaran sarana pascapanen tanaman	1	Laporan	3.210.220.000	Pengawasan sebaran saran pacapanen tanaman pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan ketersediaan dan Sebaran sarana	1	Laporan	1.603.350.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
			pangan						pascapanen tanaman pangan			
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman	10.550	Ha	3.851.125.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman			6.937.500.000
	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	3	Laporan	3.263.460.000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	4	Laporan	6.150.000.000
	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1	Laporan	587.665.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1	Laporan	787.500.000

No	Penetapan RKPD						Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					4.609.941.410						
3	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan luas lahan pertanian LP2B yang dikelola	10.400	Ha	4.609.941.410	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan luas lahan pertanian LP2B yang dikelola	10.400	Ha	6.021.204.169
	Penataan Prasarana Pertanian		Luas Lahan yang Difasilitasi Penataan Prasarana Pertanian	10.300	Ha	4.609.941.410	Penataan Prasarana Pertanian		Luas Lahan yang Difasilitasi Penataan Prasarana Pertanian	10.300	Ha	6.021.204.169
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1	Dokumen	1.367.304.325	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1	Dokumen	1.250.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1	Dokumen	3.242.637.085	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1	Dokumen	4.771.204.169
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0005 UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					411.846.443	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar	85	Persen	341.929.690	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar	85	Persen	551.185.051

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	86	Dokumen	341.929.690	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	86	Dokumen	551.185.051
	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	43	Sertifikat	180.803.474	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	85	Sertifikat	239.465.678
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1	Dokumen	161.126.216	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1	Dokumen	311.719.373
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	69.916.753	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	81.560.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	21.536.753	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			31.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.389.830	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.500.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.149.670	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.997.253	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	10.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	48.380.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.060.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	39.560.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	39.560.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	8.820.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	10.500.000
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0006 UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					3.226.032.783,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					7.221.988.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	1.487.035.795	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	707.699.692

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	50.610.030	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			35.360.966
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.532.125
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	39.570.030	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.885.966
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.640.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4.942.875
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	431.784.677	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			134.386.938
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	431.784.676,8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	134.386.938
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	320.441.088	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			426.701.788
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	320.441.088	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	426.701.788

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	684.200.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			111.250.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	40.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	Unit	16.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	Unit	20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	628.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	51.250.000
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	18,7	Persen	1.738.996.988	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	18,7	Persen	2.155.469.328
			2. Persentase Kelompok yang membentuk koorporasi	72	Persen				2. Persentase Kelompok yang membentuk koorporasi	72	Persen	
	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Penyuluh Pertanian yang Dikembangkan Kompetensinya	100	Orang	343.499.274	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Penyuluh Pertanian yang Dikembangkan Kompetensinya			353.476.835
	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	8	Unit	35.755.000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang	8	Unit	71.781.000

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

No	Penetapan RKPD						Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
									ditingkatkan kapasitasnya			
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	90	Orang	307.744.274	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	90	Orang	281.695.835
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penerapan Penyuluhan Pertanian	36	Kelompok	1.345.847.714	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penerapan Penyuluhan Pertanian			1.710.552.493
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	36	Kelompok	1.345.847.714	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	36	Kelompok	1.710.552.493
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dikembangkan	4	Unit	49.650.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dikembangkan			91.440.000
	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah korporasi petani yang didampingi	2	Unit	30.405.000	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah korporasi petani yang didampingi	2	Unit	56.520.000
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2	Unit	19.245.000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2	Unit	34.920.000
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0007 UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					2.200.348.789	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					5.434.226.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	1.545.842.645	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	1.596.305.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	19.979.445	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	31.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.998.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.987.995	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	7.992.950	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	10.500.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.389.645.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.414.935.200
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.389.645.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.414.935.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	136.218.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	149.870.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	119.878.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	119.878.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	16.340.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	29.992.200
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah produksi tanaman pangan	252.497	Ton	654.506.144	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah produksi tanaman pangan	252.497,00	Ton	653.506.144

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
			Jumlah produksi hortikultura	8.228,00	Ton				Jumlah produksi hortikultura	8.228,00	Ton	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman	7.100	Ha	628.046.144	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman	7.100	Ha	628.046.144
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat Benih	100	Sertifikat	49.325.094	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat Benih	500	Sertifikat	49.325.094
	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2	Laporan	425.141.000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1	Laporan	425.141.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura					153.580.050		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1	Laporan	153.580.050
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	1	Laporan	26.460.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	1	Laporan	25.460.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1	Laporan	26.460.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1	Laporan	25.460.000
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0008 UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.488.810.318	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					5.433.596.222

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	561.584.543	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	686.250.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	16.236.867	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	31.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.947.727	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.107.725	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4.181.415	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	10.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	303.067.776	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	393.750.000

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	303.067.776	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	393.750.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	107.280.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	126.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	42.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	42.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	65.280.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	84.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	150	sampel	135.000.000			Meningkatnya pemenuhan layanan BLUD	150	Sampel	135.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	135.000.000			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	135.000.000
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase penanganan bencana pertanian	100	Persen	927.225.675	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase penanganan bencana pertanian	100	Persen	1.501.749.909

No	Penetapan RKPD					Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
			Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	100	Persen				Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	100	Persen	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas Lahan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Bencana Pertanian	2.600	Ha	927.225.675	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas Lahan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Bencana Pertanian			1.501.749.909
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2.500	Ha	927.225.675	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2.500	Ha	1.501.749.909
						83.976.305.220						100.922.843.375

Dari tabel 2 (Tabel T-C.31.) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2026 terdiri dari 8 Program, 22 Kegiatan, dan 40 Sub Kegiatan dengan 2 Urusan yaitu Urusan Pangan (Wajib) dan Urusan Pertanian (Pilihan).
- Rencana Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 memiliki total anggaran sebesar Rp 83.976.305.220,- (Delapan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta ribu tiga ratus lima ribu dua ratus dua puluh rupiah)
- Pendanaan indikatif yang ada pada RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah direncanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan usulan program dan kegiatan masyarakat ini berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, agar didalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergis dengan dokumen perencanaan. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026 (Tabel T-C.32.)

Tabel 2.5. (Tabel T-C.32. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan (Usulan Kabupaten/Kota)	
1	2	3	4	5	6	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					
1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Pekanbaru	Intensifikasi Padi 50 Ha
					Kampar	Intensifikasi 300 Ha, Ektensifikasi 200 Ha, Intensifikasi Durian 1 Ha, Ekstensifikasi Durian 6 Ha, Ekstensifikasi Cabe 25 Ha
					Siak	Ekstensifikasi 2000 Ha, Ekstensifikasi Cabe 15 Ha
					Inhu	Ekstensifikasi Padi 390 Ha
					Inhil	Intensifikasi Padi 500 Ha, Ekstensifikasi Padi 250 Ha, Ekstensifikasi Durian 13 Ha
					Rohul	-
					Rohil	Ekstensifikasi Durian 5 Ha, Ekstensifikasi Cabe 5 Ha
					Bengkalis	Ekstensifikasi cabe 1 Paket

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan (Usulan Kabupaten/Kota)	
1	2	3	4	5	6	
					Kep.Meranti	Ekstensifikasi 1000 Ha, Intensifikasi durian 10 Ha, Ekstensifikasi Durian 20 Ha, Ekstensifikasi Cabe 10 Ha
					Kuansing	Intensifikasi Padi 150 Ha, Ektensifikasi Padi 500 Ha, Intensifikasi Durian 2 Ha, Ekstensifikasi Durian 2 Ha, Ekstensifikasi Cabe 4 Ha
					Dumai	Ekstensifikasi Padi 30 Ha, Ekstensifikasi Cabe 10 Ha
					DPRD	Combine Harvester Besar
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Penataan Prasarana Pertanian					
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	Kampar	5000 Km
					Kep.Meranti	30 Km
					Kuansing	15 Km
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	Kampar	5000 Ha
					Inhil	1000 Ha

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan (Usulan Kabupaten/Kota)	
1	2	3	4	5	6	
					Rohul	50 Ha
					Kep.Meranti	500 Ha
					Kuansing	4 Paket
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					
5	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	777 Kelompok	Bengkalis	2
					Dumai	1
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
6	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	80 Sertifikat	Pekanbaru	60
					Kampar	18
					Siak	10
					Inhu	4

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan (Usulan Kabupaten/Kota)	
1	2	3	4	5	6	
					Inhil	7
					Rohil	10
					Bengkalis	16
					Kuansing	3
					Dumai	10

Usulan Program dan Kegiatan pada tabel T-C.32. diatas diperoleh dari Forum Perangkat Daerah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berdasarkan analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Penambahan volume pada kegiatan yang menjadi prioritas utama (peningkatan produksi padi) serta kegiatan pendukung (pembangunan jalan usaha tani dan perbaikan jaringan irigasi) diharapkan dapat memberikan dukungan dalam mencapai target yang ditetapkan. Selain menghimpun usulan program yang berasal dari Forum Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahun 2026 juga memuat usulan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Riau. Usulan tersebut berkaitan erat dengan isu sektor pertanian sub sektor tanaman pangan berupa peningkatan produksi dan produktifitas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau (RPJMD) Tahun 2025–2029, untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, maka arah kebijakan pembangunan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau diselaraskan dengan arah pembangunan nasional yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025-2029.

Mengacu pada pemikiran tersebut, maka dalam penyusunan arah pembangunan pertanian Tahun 2026 disamping berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025-2029, juga diselaraskan dengan arah pembangunan nasional melalui RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Telaahan terhadap kebijakan nasional khususnya pembangunan pertanian Provinsi Riau diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yaitu melakukan upaya peningkatan produksi tanaman pangan (padi dan jagung) melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, serta meningkatkan diversifikasi pangan guna mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Riau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Riau merupakan salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang melaksanakan salah satu urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan kewenangan Provinsi dan tugas dinas teknis lingkup Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a) Tujuannya adalah meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan kesejahteraan Petani.
- b) Sasarannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya ketersediaan pangan.
 - 2) Meningkatnya pendapatan petani.
 - 3) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang akan dicapai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026
 (Indeks Kinerja Utama)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan kesejahteraan Petani		1. Indeks Ketahanan Pangan	73,46
			2. NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	96,32

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. NTP Sub Sektor Hortikultura	107,24
1		Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan	40,77
2		Meningkatnya Pendapatan Petani	1. NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan	97,56
			2. NTUP Sub Sektor Hortikultura	105,33
3		Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,42

Sumber Data : Renstra DPTPH 2025-2029

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau berdasarkan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah Provinsi Riau belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah yakni : (1) Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan, (2) Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar, (3) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah, (4) Rendahnya produktivitas sektor pertanian, (5) Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan secara khusus dalam pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura adalah ; (1) Pengembangan ketersediaan pangan lokal, (2) Pengendalian kerentanan pangan, (3) Penanganan daerah rawan pangan kronis, (4) Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sereal (padi dan jagung), (5) Perluasan areal tanam melalui rehabilitasi sawah terlantar, (6) Bantuan bibit unggul dan sarana produksi pertanian, (7) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung seperti perbaikan irigasi, alat dan mesin pertanian, (8) Penerapan teknologi pertanian (Teknologi Sapta Usaha Tani), (9) Memberikan kemudahan akses permodalan bagi petani, (10) Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh, pengawas benih tanaman dan pengawas organisme pengganggu tanaman, (11) Kerjasama lintas sektor (*cross cutting*) lingkup pemerintah Provinsi Riau.

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau serta memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau yakni meningkatkan produksi pertanian, maka penetapan rencana program dan kegiatan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 dititik beratkan pada pencapaian kearah peningkatan produksi pangan khususnya padi. Berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkan :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian
7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada Rencana Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 ditetapkan rencana program/kegiatan sebanyak 8 program dengan 22 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Fokus kegiatan Tahun 2026 masih pada peningkatan ketahanan pangan, pencapaian peningkatan produksi padi, upaya peningkatan kualitas pasca panen, intensifikasi tanaman serealia, peningkatan produksi cabai, serta dukungan alat mesin pertanian dan pengembangan dan perbaikan irigasi tersier dan jalan usaha tani. Berdasarkan Penetapan RKPD membutuhkan Rp 83.976.305.220,- (Delapan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan rincian seperti pada tabel T-C.33. berikut :

Tabel 3.2. (Tabel T-C.33. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				76.649.266.887,00				229.661.711.324,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.986.485.876,00				2.593.208.125,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.986.485.876,00				2.593.208.125,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.948.308.496,00			-	1.968.090.625,00
	[Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	Skor Pola Pangan Harapan	-	93.15	1.948.308.496,00	-	-	-	1.968.090.625,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>		7 Dokumen	665.058.960,00		-	-	1.157.753.125,00
2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua	1 Dokumen	366.600.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kecamatan, Semua Kel/Desa						
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
		<i>Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	111.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		231.525.000,00
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis								
		<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	23.230.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		86.821.875,00
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi								
		<i>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan</i>	Semua Kota/Kab, Semua	1 Laporan	106.830.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-		115.762.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Konsumen di Provins</i>	Kecamatan, Semua Kel/Desa			(PAD)			
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi								
		<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	26.560.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		57.881.250,00
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)								
		<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.565.104,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		57.881.250,00
2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi								
		<i>Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.683.656,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		57.881.250,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</i>		1 Laporan	1.105.000.000,00		-	-	347.287.500,00
2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi								
		<i>Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Ton	1.105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		347.287.500,00
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	<i>Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</i>		4 Dokumen	178.249.536,00		-	-	463.050.000,00
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
		<i>Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	133.842.672,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		231.525.000,00
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)								

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	32.494.104,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		115.762.500,00
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun								
		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.123.656,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		57.881.250,00
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi								
		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.789.104,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		57.881.250,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				38.177.380,00			-	625.117.500,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatkan penanganan kerawanan pangan]	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-	4.07	38.177.380,00	-	-	-	625.117.500,00
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)		1 Laporan	17.932.380,00		-	-	312.558.750,00
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota								
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17.932.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		312.558.750,00
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)		1 Laporan	20.245.000,00		-	-	312.558.750,00
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi								
		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.245.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		312.558.750,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				74.662.781.011,00				227.068.503.199,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				74.662.781.011,00				227.068.503.199,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				55.308.244.601,00			-	59.565.726.896,00
	[Terpenuhiya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran]	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100	55.308.244.601,00	-	-	-	59.565.726.896,00
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	27.240.500,00		-	-	127.338.750,00
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27.240.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		127.338.750,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		1 Laporan	47.364.285.488,00		-	-	50.822.481.896,00
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang/ Bulan	47.364.285.488,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.822.481.896,00
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		100 Persen	29.073.000,00		-	-	22.050.000,00
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.823.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.250.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		100 Persen	25.550.000,00		-	-	55.125.000,00
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.550.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		55.125.000,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		100 Persen	1.278.590.303,00		-	-	1.526.043.750,00
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	34.991.838,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		38.587.500,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	198.782.067,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		192.937.500,00
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	211.026.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		248.062.500,00
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	32.362.939,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		93.712.500,00
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	Kota Pekanbaru, Semua	1 Laporan	794.903.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-		941.718.750,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SKPD	Kecamatan, Semua Kel/Desa			(PAD)			
3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.524.459,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	826.552.114,00		-	-	220.500.000,00
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	597.947.842,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.250.000,00
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</i>	Kota Pekanbaru, Semua	1 Unit	228.604.272,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-		110.250.000,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Disediakan</i>	Kecamatan, Semua Kel/Desa			(PAD)			
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	4.600.334.096,00		-	-	5.589.675.000,00
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.270.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		22.050.000,00
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.364.999.296,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		1.433.250.000,00
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,	1 Laporan	3.220.064.800,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		4.134.375.000,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	1.156.619.100,00		-	-	1.202.512.500,00
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	244.530.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		270.112.500,00
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67 Unit	274.592.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		192.937.500,00
3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel								

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105 Unit	223.997.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		82.687.500,00
	-	-	-	-	55.308.244.601,00	-	-	-	59.565.726.896,00
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	318.499.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		645.750.000,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN				14.744.595.000,00			-	34.291.901.303,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SARANA PERTANIAN								
	[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	Jumlah Produksi Hortikultura	-	252497	14.744.595.000,00	-	-	-	34.291.901.303,00
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan		8228					
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas Lahan yang Difasilitasi Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		5650 Ha	10.893.470.000,00		-	-	25.854.901.303,00
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian								
		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.683.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.254.901.303,00
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan								
		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	3.210.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		600.000.000,00
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman		10550 Ha	3.851.125.000,00		-	-	8.437.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Benih Tanaman								
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan								
		<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3.263.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.500.000.000,00
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura								
		<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	587.665.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.937.000.000,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				4.609.941.410,00			-	133.210.875.000,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatkan distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian]	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola	-	10400	4.609.941.410,00	-	-	-	133.210.875.000,00
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Luas Lahan yang Difasilitasi Penataan Prasarana Pertanian		10300 Ha	4.609.941.410,00		-	-	133.210.875.000,00
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani								
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.367.304.325,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.605.437.500,00
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani								
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.242.637.085,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		129.605.437.500,00
	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN				411.846.443,00				522.286.875,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				411.846.443,00				522.286.875,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				411.846.443,00				522.286.875,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				69.916.753,00			-	88.177.500,00
	-	-	-	-	69.916.753,00	-	-	-	88.177.500,00
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	21.536.753,00		-	-	33.052.500,00
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.389.830,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.002.500,00
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.149.670,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.997.253,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	48.380.000,00		-	-	55.125.000,00
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	39.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		44.100.000,00
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	8.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				341.929.690,00			-	434.109.375,00
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		86 Dokumen	341.929.690,00		-	-	434.109.375,00
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan								
		Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Sertifikat	180.803.474,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		378.984.375,00
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan								
		Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	161.126.216,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.125.000,00
	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN				3.226.032.783,10				6.414.187.500,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.226.032.783,10				6.414.187.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.226.032.783,10				6.414.187.500,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.487.035.795,10			-	605.062.500,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	50.610.030,30		-	-	33.075.000,00
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	39.570.030,30	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	431.784.676,80		-	-	11.025.000,00
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	431.784.676,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	320.441.088,00		-	-	441.000.000,00
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua	1 Laporan	320.441.088,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-		441.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kecamatan, Semua Kel/Desa			(PAD)			
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	684.200.000,00		-	-	119.962.500,00
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	40.000.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		44.100.000,00
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Unit	16.000.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		22.050.000,00
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</i>	Kota Pekanbaru, Semua	1 Unit	628.200.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH	-		53.812.500,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kecamatan, Semua Kel/Desa			(PAD)			
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.738.996.988,00			-	5.809.125.000,00
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah Penyuluh Pertanian yang Dikembangkan Kompetensinya</i>		100 Orang	343.499.274,00		-	-	661.500.000,00
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian								
		<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	35.755.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.500.000,00
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian								
		<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	307.744.274,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		441.000.000,00
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penerapan</i>		36 Kelompok	1.345.847.714,00		-	-	4.816.875.000,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Penyuluhan Pertanian</i>							
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani								
		<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Kelompok	1.345.847.714,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.816.875.000,00
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	<i>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dikembangkan</i>		4 Unit	49.650.000,00		-	-	330.750.000,00
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani								
		<i>Jumlah korporasi petani yang didampingi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	30.405.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		165.375.000,00
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani								
		<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	2 Unit	19.245.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		165.375.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kel/Desa						
	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				2.200.348.789,00				3.316.075.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.200.348.789,00				3.316.075.000,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.200.348.789,00				3.316.075.000,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.545.842.645,00			-	1.907.325.000,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	19.979.445,00		-	-	33.075.000,00
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.998.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.987.995,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.992.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	1.389.645.200,00		-	-	1.708.875.000,00
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.389.645.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.708.875.000,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	136.218.000,00		-	-	165.375.000,00
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	119.878.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		132.300.000,00
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	16.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33.075.000,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				654.506.144,00			-	1.408.750.000,00
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman</i>		7100 Ha	628.046.144,00		-	-	1.353.625.000,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih								
		<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Sertifikat	49.325.094,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.625.000,00
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan								
		<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	425.141.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		753.000.000,00
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura								
		<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat,</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	153.580.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		325.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>dan harga</i>							
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme</i>		1 Laporan	26.460.000,00		-	-	55.125.000,00
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme								
		<i>Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	26.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.125.000,00
	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				1.488.810.318,00				4.070.288.633,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.488.810.318,00				4.070.288.633,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.488.810.318,00				4.070.288.633,00
3.27.01	PROGRAM				561.584.643,00			-	728.812.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		100 Persen	16.236.867,00		-	-	33.075.000,00
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.947.727,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.107.725,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua	1 Paket	4.181.415,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.025.000,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kel/Desa						
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	303.067.776,00		-	-	413.437.500,00
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	303.067.776,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		413.437.500,00
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 Persen	107.280.000,00		-	-	132.300.000,00
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	42.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		44.100.000,00
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin</i>	Kota	50 Unit	65.280.000,00	PENDAPATAN	-		88.200.000,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Lainnya yang Dipelihara</i>	Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			N ASLI DAERAH (PAD)			
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Meningkatnya Pemenuhan Layanan BLUD</i>		150 Sampel	135.000.000,00		-	-	150.000.000,00
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	135.000.000,00	PENDAPATA N DARI BLUD	-		150.000.000,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				927.225.675,00			-	3.341.476.133,00
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	<i>Luas Lahan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Bencana Pertanian</i>		2600 Ha	927.225.675,00		-	-	3.341.476.133,00
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
		<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman</i>	Semua Kota/Kab, Semua	2500 Ha	927.225.675,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH	-		3.341.476.133,00

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	Kecamatan, Semua Kel/Desa			(PAD)			
J U M L A H					83.976.305.220,10				243.984.549.332,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 serta Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
2. Keserasian dan keterpaduan sektor-sektor lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada Tahun 2026 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan

- dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2026 adalah sebanyak 22 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 16 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada Tahun 2026 adalah sebanyak 40 subkegiatan,
 4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 adalah sebesar Rp 83.976.305.220.,- yang bersumber dari dana APBD Provinsi,
 5. Terdapat 2 sub kegiatan yang terkait pemberdayaan perempuan dan data pilah yaitu sub kegiatan Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dimana penyediaan dan penyaluran pangan pokok juga disalurkan kepada kelompok wanita tani. Kemudian sub kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian . Kegiatan-kegiatan tersebut secara eksplisit dilaksanakan untuk menjawab isu gender yang ada di bidang pertanian dimana peran serta perempuan dalam kegiatan usaha tani maupun dalam kelembagaan tani masih rendah. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan ini peran serta wanita dalam pembangunan pertanian dapat meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya kelompok wanita tani dan meningkatnya jumlah wanita yang tergabung dalam kelembagaan tani.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 disertai indikator program, kegiatan dan subkegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						76.649.266.887,00							229.661.711.324,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.986.485.876,00							2.593.208.125,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.986.485.876,00							2.593.208.125,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.948.308.496,00						-	1.968.090.625,00	
		[Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	Skor Pola Pangan Harapan	100	88.14	91.1	93.15	1.948.308.496,00	-	-	-	-	-	-	1.968.090.625,00	-
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-			7 Dokumen	665.058.960,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	1.157.753.125,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Dokumen	366.600.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		550.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	111.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		231.525.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	23.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		86.821.875,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins				1 Laporan	106.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		115.762.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				1 Laporan	26.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		57.881.250,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	5.565.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		57.881.250,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi														
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi				1 Dokumen	24.683.656,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		57.881.250,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-			1 Laporan	1.105.000.000,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	347.287.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				85 Ton	1.105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		347.287.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-			4 Dokumen	178.249.536,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	463.050.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	133.842.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		231.525.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	32.494.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		115.762.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	6.123.656,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		57.881.250,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi				1 Laporan	5.789.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		57.881.250,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						38.177.380,00						-	625.117.500,00	
		[Meningkatkan penanganan kerawanan pangan]	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1.74	5.23	4.65	4.07	38.177.380,00	-	-	-	-	-	-	625.117.500,00	-

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	-			1 Laporan	17.932.380,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	312.558.750,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	17.932.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		312.558.750,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	-			1 Laporan	20.245.000,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	312.558.750,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Dokumen	20.245.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		312.558.750,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						74.662.781.011,00							227.068.503.199,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						74.662.781.011,00							227.068.503.199,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						55.308.244.601,00						-	59.565.726.896,00	
		[Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran]	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	55.308.244.601,00	-	-	-	-	-	-	59.565.726.896,00	-

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			1 Dokumen	27.240.500,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	127.338.750,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	27.240.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		127.338.750,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Admininstrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Laporan	47.364.285.488,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	50.822.481.896,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				300 Orang/ Bulan	47.364.285.488,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		50.822.481.896,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Admininstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	29.073.000,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	22.050.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	20.823.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	25.550.000,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	55.125.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	25.550.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		55.125.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.278.590.303,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	1.526.043.750,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.991.838,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		38.587.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	198.782.067,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		192.937.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	211.026.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		248.062.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.362.939,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		93.712.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	794.903.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		941.718.750,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	6.524.459,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.025.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	826.552.114,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	220.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	597.947.842,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		110.250.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	228.604.272,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		110.250.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	4.600.334.096,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	5.589.675.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		22.050.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.364.999.296,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		1.433.250.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.220.064.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		4.134.375.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	1.156.619.100,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	1.202.512.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	244.530.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		270.112.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	274.592.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		192.937.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	95.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				105 Unit	223.997.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		82.687.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		-	-	-	-	-	-	55.308.244.601,00	-	-	-	-	-	-	59.565.726.896,00	-
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	318.499.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		645.750.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						14.744.595.000,00						-	34.291.901.303,00	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	Jumlah Produksi Hortikultura	325.744	222.055	236.919	252.497	14.744.595.000,00	-	-	-	-	-	-	34.291.901.303,00	-
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan	8.910	7.907	8.066	8.228									
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas Lahan yang Difasilitasi Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	-			5650 Ha	10.893.470.000,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	25.854.901.303,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	7.683.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		25.254.901.303,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan				1 laporan	3.210.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		600.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman	-			10550 Ha	3.851.125.000,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	8.437.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				3 Laporan	3.263.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		6.500.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	587.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		1.937.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						4.609.941.410,00						-	133.210.875.000,00	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian]	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola	11.000	10.300	10.350	10.400	4.609.941.410,00	-	-	-	-	-	-	133.210.875.000,00	-

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Luas Lahan yang Difasilitasi Penataan Prasarana Pertanian	-			10300 Ha	4.609.941.410,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	133.210.875.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	1.367.304.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		3.605.437.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	3.242.637.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		129.605.437.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN						411.846.443,00							522.286.875,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						411.846.443,00							522.286.875,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						411.846.443,00							522.286.875,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						69.916.753,00						-	88.177.500,00	
		-	-	-	-	-	-	69.916.753,00	-	-	-	-	-	-	88.177.500,00	-
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	21.536.753,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	33.052.500,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.389.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		11.002.500,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.149.670,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.997.253,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	48.380.000,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	55.125.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	39.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		44.100.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	8.820.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						341.929.690,00						-	434.109.375,00	

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			86 Dokumen	341.929.690,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	434.109.375,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				43 Sertifikat	180.803.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		378.984.375,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	161.126.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		55.125.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN						3.226.032.783,10							6.414.187.500,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.226.032.783,10							6.414.187.500,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.226.032.783,10							6.414.187.500,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.487.035.795,10						-	605.062.500,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	50.610.030,30			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	33.075.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.570.030,30	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.640.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	431.784.676,80			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	11.025.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	431.784.676,80	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	320.441.088,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	441.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	320.441.088,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		441.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	684.200.000,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	119.962.500,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	40.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		44.100.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	16.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		22.050.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	628.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		53.812.500,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
2.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						1.738.996.988,00						-	5.809.125.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Dikembangkan Kompetensinya	-			100 Orang	343.499.274,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	661.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				8 Unit	35.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		220.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				90 Orang	307.744.274,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		441.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penerapan Penyuluhan Pertanian	-			36 Kelompok	1.345.847.714,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	4.816.875.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani															
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				36 Kelompok	1.345.847.714,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		4.816.875.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dikembangkan	-			4 Unit	49.650.000,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	330.750.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani															
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				2 Unit	30.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		165.375.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani															
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				2 Unit	19.245.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		165.375.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	
		UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							2.200.348.789,00							3.316.075.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.200.348.789,00							3.316.075.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.200.348.789,00							3.316.075.000,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.545.842.645,00						-	1.907.325.000,00		

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrtasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	19.979.445,00			-	-	-	-	33.075.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.998.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.025.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.987.995,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.992.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	1.389.645.200,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	1.708.875.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.389.645.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		1.708.875.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	136.218.000,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	165.375.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	119.878.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		132.300.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	16.340.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		33.075.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						654.506.144,00						-	1.408.750.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman	-			7100 Ha	628.046.144,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	1.353.625.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Benih				100 Sertifikat	49.325.094,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		275.625.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	425.141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		753.000.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	153.580.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		325.000.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	-			1 Laporan	26.460.000,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	55.125.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme														
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				1 Laporan	26.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		55.125.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						1.488.810.318,00							4.070.288.633,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.488.810.318,00							4.070.288.633,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.488.810.318,00							4.070.288.633,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						561.584.643,00						-	728.812.500,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administarsi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	16.236.867,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	33.075.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.947.727,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.107.725,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.181.415,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		11.025.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	303.067.776,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	413.437.500,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	303.067.776,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		413.437.500,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	107.280.000,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	132.300.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		44.100.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	65.280.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		88.200.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Pemenuhan Layanan BLUD	-			150 Sampel	135.000.000,00			-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-	-	150.000.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	135.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	TRANSFO RMASI EKONOMI	-		150.000.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						927.225.675,00						-	3.341.476.133,00	

Rencana Kerja DPTPH Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Lahan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Bencana Pertanian	-			2600 Ha	927.225.675,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI	-	-	3.341.476.133,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2500 Ha	927.225.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI EKONOMI	-		3.341.476.133,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	J U M L A H							83.976.305.220,10							243.984.549.332,00		

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target serta pagu indikatif Perangkat Daerah yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2025-2029 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan pertanian di Provinsi Riau.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen ini mengikat secara kelembagaan sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2026 yang berpedoman dan tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan pertanian harus dilakukan lebih intensif di dalam koordinasi antar instansi yang terkait, agar hasil pembangunan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat dalam mewujudkan perekonomian daerah yang kompetitif. Selanjutnya juga agar masyarakat turut berperan aktif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pertanian, maka proses perencanaan dilakukan dengan menghimpun usulan dan masukan dari masyarakat Provinsi Riau secara bertahap dan berjenjang.

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun berjalan, apabila Rencana Kerja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Riau, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana

Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yaitu :

1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kemiskinan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan mendalam, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan stunting juga dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas program dalam menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Riau.
3. Ketergantungan petani yang sangat tinggi terhadap bantuan alsintan pertanian sedangkan anggaran sangat terbatas sehingga perlu dilakukan identifikasi riil kebutuhan alsintan pertanian di wilayah sentra produksi.
4. Terbatasnya infrastruktur pertanian yang berdampak terhadap peningkatan Indeks Pertanaman (IP), penambahan luas baku lahan, penambahan luas tambah tanam dan peningkatan produktifitas.
5. Belum memadainya ketersediaan benih lokal yang sesuai dengan kondisi geografis setempat sehingga belum mampu meningkatkan produksi.

Rencana Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh SKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang mejadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

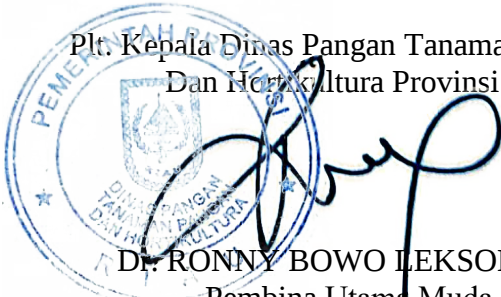
- Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau mempunyai komitmen dan tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.

- Menjaga konsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026.
- Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Riau.
- Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Renja Perubahan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026. Selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Pekanbaru, November 2025

Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi Riau



DR. RONNY BOWO LEKSONO, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760513 200501 1 012

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jln. HR. Soebrantas No. 4 - Pekanbaru, Kode Pos 28294

Telepon. (0761) 7434974

Email : diatanhor@riau.go.id website : <https://distanhor.riau.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU

NOMOR : 000.7.2.6/241/DISPTPH/SETDIS/ TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) TAHUN 2026
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 137 peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan menteri dalam negeri No. 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau;

8. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang peraturan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Provinsi Riau.
9. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah, dan sempat diubah oleh Pergub Nomor 24 Tahun 2024
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.
12. PERDA Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022: tentang Perubahan atas PERDA Nomor 3 Tahun 2019. Untuk periode mendatang, Pemerintah Provinsi Riau telah mengajukan Ranperda RPJMD 2025-2029 ke DPRD Provinsi Riau untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2020 (tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura)
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019, yang mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.;
15. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2020 yang mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
16. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2026 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU.**
- Kesatu :** Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2026
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pekanbaru
pada tanggal : Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU,

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 1994121001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
NOMOR : 000.7.2.6/241/DISPTPH/SETDIS/2025
TANGGAL : 10 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2026
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	KEPALA DINAS	KETUA
2	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
3	Ka. Tim Perencanaan Program	Sekretaris
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
5	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Anggota
6	Kepala Bidang Hortikultura	Anggota
7	Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian	Anggota
8	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
8	Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluh Pertanian	Anggota
9	Kepala UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10	Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Anggota
11	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
12	Abd Hannan (Perencana Ahli Madya)	Anggota
13	Syarifah Nur Qomariah (Perencana Ahli Muda)	Anggota
14	Indra Rajawane (Perencana Ahli Muda)	Anggota
16	Dedy Tosumpri (Perencana Ahli Pertama)	Anggota

Ditetapkan : di Pekanbaru
pada tanggal : 10 Februari 2025

PIT. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU,

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 1994121001

Formulir E.29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2025

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	√			
10a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			
10b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
10c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.	√			

Pekanbaru, November 2025
Pjt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi Riau

Dr. RONNY BOWO LEKSONO, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760513 200501 1 012

**TABEL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	√		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	√		
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	√		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan Tabel T-C.29	√ √ √ √ √ √ √		
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan Tabel T-C.30	√ √		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	√ √ √ √ √		
	2.4 Review terhadap RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan 4. Sajikan Tabel T-C.31	√	√	- Pagu Indikatif sesuai SIPD tahapan Rancangan Akhir

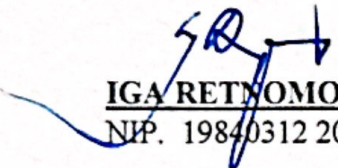
NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32	√		
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	√		
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah; 2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	√		
	3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan;	√		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33	√		
			√		
			√		
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD		√	- Agar menampilkan tabel hasil inputan pada SIPD sesuai dengan tahapan Rancangan Akhir
5	BAB V	PENUTUP			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.	√		
			√		
			√		
			√		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
6	LAMPIRAN	SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 Formulir E 29			- Agar dilampirkan pada Rancangan Akhir dan Dokumen Renja 2026 - Agar dilengkapi pada Dokumen Renja 2026

**DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**

1. SEKRETARIS



IGA RETNOMO

NIP. 19840312 200604 1 006

**2. KETUA TIM SUB SUBSTANSI
PERENCANAAN PROGRAM**



UDIN ITAL

NIP. 19710914 200501 1 002

Pekanbaru,

November 2025

DIVERIFIKASI OLEH :

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

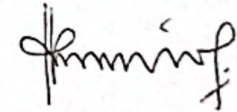
KABID PEREKONOMIAN DAN SDA



ABDUL MADIAN

NIP. 19750516 200212 1 006

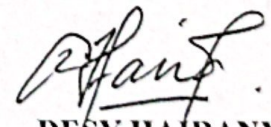
1. PERENCANA AHLI MUDA



RIZKY RACHMAWATI

NIP. 19800331 200903 3 002

2. PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



DESY HAIRANY

NIP. 19800122 200501 2 009



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENJA-PD
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU TAHUN 2026



NOMOR : 466/LHR/INSP-RIAU/Ir.IV/XII/2025

TANGGAL : 22 DESEMBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
Email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

Nomor : 466/LHR/INSP-RIAU/Ir.IV/XII/2025 Pekanbaru, 22 Desember 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas
Rancangan Akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD)
Dinas Pangan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Riau
Tahun 2026

Yth. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
di - Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, kami telah melakukan reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** didukung dengan dokumen pendukung yang memadai.
2. Penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **telah sepenuhnya** mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025.
3. Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 pada BAB III **belum sepenuhnya** selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada BAB IV Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana **masih terdapat** rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang **belum disajikan** dalam dokumen Rancangan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026.

4. Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **telah selaras** dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
5. Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026.
6. Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.
7. Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.
8. Penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan pagu RKPD Tahun 2026.
9. Penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** mempedomani indikator target pada Renstra-PD.

II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 370/SPT/2025 tanggal 03 November 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau ini bertujuan untuk:

1. Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan saran perbaikan atas kelemahan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Kelengkapan dokumen pendukung penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
2. Kesesuaian sistematika penulisan dan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD;
4. Penyusunan substansi antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :
 - a. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - b. Indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - c. Keselarasan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - d. Keselarasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);

- e. Keselarasan pagu Renstra-PD, RKPD dengan pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD); dan
- f. Keselarasan indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.
3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

VI. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif sesuai pembedangannya yang pertanggungjawabannya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Adapun hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, yaitu:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2026; dan
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelengkapan dokumen pendukung penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** didukung dengan dokumen pendukung yang memadai sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 01.

2. Kesesuaian sistematika penulisan dan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **telah sepenuhnya** mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 02.

3. Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 pada BAB III **belum sepenuhnya** selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada BAB IV Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana **masih terdapat** rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang **belum disajikan** dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 03.

4. Penyusunan substansi antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :

a. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **telah selaras** dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.a.

b. Indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.b.

c. Keselarasan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.c.

d. Keselarasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.d.

e. Keselarasan pagu Renstra-PD, RKPD dengan pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.e.

f. Keselarasan indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** mempedomani indikator target pada Renstra-PD sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.f.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Revidi (KKR) Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

VIII. Saran

Berdasarkan hasil revidi atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 agar:

1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026

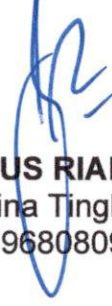
2. Melakukan penyesuaian/ penyempurnaan penyajian Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Rumusan Indikator dan Target Kinerja antara Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan melakukan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk penyempurnaan penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, dimana **masih terdapat** rumusan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang **belum disajikan** dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026.
4. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 dengan mempedomani pagu yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Surat Gubernur Riau Nomor 000.7.2.4/Bappeda-Bid I/2025/4818 untuk diinput ke dalam SIPD

IX. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **Pt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,**


Ir. AGUS Rianto, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680809 199303 1 004

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



Ir. AGUS RIANTO, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680809 199303 1 004

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENJA-PD
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN 2026**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256

email : inspektorat@riau.go.id website : inspkotorat.riau.go.id

PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh	IRFAN ADI PUTRA, S.Sos,M.IP
	Tanggal	15 Desember 2025
	Direviu oleh	AULIA OSNA RAHMA WANTO, SH, MH
	Tanggal	15 Desember 2025
	Disetujui oleh	RONI COKRO SUBAGIO, SE, M.Si
	Tanggal	15 Desember 2025

CATATAN HASIL REVIU

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**

Uraian Catatan Hasil Reviu	No Indeks KKR
A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD);	KKR.001
Penyusunan Dokumen Rancangan Akahir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya didukung dengan dokumen yang memadai.	
B. Pengujian atas Kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR.002
Penyajian Sistematika penulisan dan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 sudah sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Bappeda Provinsi Riau Nomor: 000.7/136/ BAPPEDA-BIDANG I/2025 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Provinsi Riau Tahun 2026.	
C. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renja-PD dengan Rancangan Akhir RKPD	KKR.003
Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 pada Bab III belum sepenuhnya selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada Bab IV Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana masih terdapat rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang belum	

disajikan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026	
D. Pengujian Atas Penyusunan Subtansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja-PD meliputi :	
1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Didasarkan pada Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR.04.a
Penetapan Tujuan, Sasaran, sudah didukung dengan Program dan Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, serta penetapan tujuan dan sasaran sudah didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;	
2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR.04.b
Penyajian Substansi antar Bab pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026.	
3. Keselarasan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra, RKPD dan Rancir Renja Perangkat Daerah;	KKR.04.c
Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	
4. Keselarasan Rumusan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra, RKPD dan Rancangan Akhir Renja;	KKR.004.d
Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	

5. Keselarasan Pagu Renstra, RKPD 2025 dengan Pagu Ranhir Renja 2026;	KKR.004.e
Penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dengan pagu RKPD Tahun 2026	
6. Keselarasan Rumusan Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra, RKPD dan Ranhir Renja Perangkat Daerah;	KKR.004.f
Penyajian rumusan Target Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya mempedomani target kinerja pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)	
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	
SARAN	
Berdasarkan hasil reuiu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja-PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 agar:	
1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026;	
2. Melakukan penyesuaian/ penyempurnaan penyajian Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Rumusan Indikator dan Target Kinerja antara Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan melakukan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk penyempurnaan penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);	
3. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, dimana masih terdapat rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang belum disajikan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026	

dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, dimana **masih terdapat** rumusan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang **belum disajikan** dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026

4. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 dengan mempedomani pagu yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Surat Gubernur Riau Nomor 000.7.2.4/Bappeda-Bid I/2025/4818 untuk diinput ke dalam SIPD

**PLT. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
RIAU**

DR. RONNY BOWO LEKSONO, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760513 200501 1 012

Pekanbaru, 15 Desember 2025

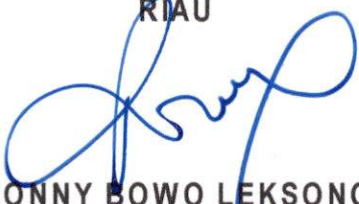
PENGENDALI MUTU,

Drs. ARMANSYAH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631231 198303 1 309

dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026, dimana **masih terdapat** rumusan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang **belum disajikan** dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026

4. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2026 dengan mempedomani pagu yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Surat Gubernur Riau Nomor 000.7.2.4/Bappeda-Bid I/2025/4818 untuk diinput ke dalam SIPD

PLT. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
RIAU


DR. RONNY BOWO LEKSONO, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760513 200501 1 012

Pekanbaru, 15 Desember 2025

PENGENDALI MUTU,


Drs. ARMANSYAH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631231 198303 1 309